

## Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2020-2023

Maria Regina Nansi<sup>1,\*</sup>, Fika Hidayati<sup>2</sup>, Maria Emiliana Natalia Trisakti Susanti<sup>3</sup>, Rina Putri Dewitasari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas AKPRIND Indonesia

\*Email Korespondensi : maria.nansi@akprind.ac.id

### Abstract

*The financial ratio analysis in this research is aimed at assessing the financial performance of the Yogyakarta City Government for the fiscal year 2020-2023. The research method used is descriptive-quantitative by utilizing secondary data in the form of Yogyakarta City Regional Government financial reports for 2020-2023, Budget Realization Reports, balance sheets, and Yogyakarta City PAD Recipient Details Reports. Secondary data was obtained through literature studies and published financial reports. This research uses five financial ratios, namely the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, harmony ratio and growth ratio.*

*The analysis results of these five ratios show that the City of Yogyakarta has experienced improvements in several aspects of financial management, especially in the independence and effectiveness ratios. The independence ratio increased from 51% to 67%, indicating a better ability to rely on PAD. The effectiveness ratio is always above 100%, indicating the effectiveness of revenue management. The efficiency ratio is below 100%, indicating efficient use of the budget. The alignment ratio shows an increase in operational expenditure, while capital expenditure remains stable. In conclusion, the City of Yogyakarta has succeeded in maintaining financial stability and budget efficiency, but needs more attention to the allocation of capital expenditure for long-term development.*

*Although financial implementation each year is generally in accordance with planning, budget absorption is less than optimal due to the use of a budget.*

**Keywords:** Financial performance, financial ratios, budget

### Abstrak

Analisis rasio keuangan pada penelitian ini ditujukan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2020-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023, Laporan Realisasi Anggaran, neraca, dan Laporan Rincian Penerima PAD Kota Yogyakarta. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan laporan keuangan yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan lima rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis dari kelima rasio tersebut, menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta telah mengalami peningkatan dalam beberapa aspek pengelolaan keuangan, terutama pada rasio kemandirian dan efektivitas. Rasio kemandirian meningkat dari 51% menjadi 67%, menandakan kemampuan yang lebih baik dalam mengandalkan PAD. Rasio efektivitas selalu di atas 100%, mengindikasikan efektivitas pengelolaan pendapatan. Rasio efisiensi berada di bawah 100%, menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien. Rasio keserasian menunjukkan peningkatan belanja operasional, sementara belanja modal tetap stabil. Kesimpulannya, Kota Yogyakarta berhasil menjaga stabilitas keuangan dan efisiensi anggaran, namun perlu perhatian lebih pada alokasi belanja modal untuk pembangunan jangka panjang.

**Kata kunci:** Kinerja keuangan, rasio keuangan, anggaran

Received: 22-11-2024; Accepted: 18-02-2025; Published 20-02-2025

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan sosial pada masyarakat Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pemberlakuan pembatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya dari pengendalian penyebaran virus, justru mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020. Akibatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif (Nansi, 2022).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan di wilayahnya. Dalam mengalokasikan dana masyarakat, pemerintah daerah harus menunjukkan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang mengacu pada kewajiban individu untuk tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil (Tahir et al., 2021).

Era otonomi daerah membawa pemerintah Indonesia ke dalam masa baru dalam mengelola sumber daya sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah (Salsabilla & Alam, 2023; Karlina & Handayani, 2017). Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ranah moneter dan fiskal nasional, yang dikenal sebagai Desentralisasi Fiskal (Indrijawati, 2024; Marliani, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan laporan keuangan pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu, yang menggambarkan tentang kapabilitas pemerintah untuk melakukan tanggung jawabnya. Tujuan pelaporan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan transparansi dan menjadi pedoman mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Angin et al., 2023). Keluaran hasil APBD dapat diolah menjadi informasi untuk mengetahui perhitungan kinerja keuangan pemerintah berdasarkan indikator keuangan yang digunakan (Putra, 2022).

Prestasi kinerja suatu pemerintah daerah dapat diukur dengan mempertimbangkan unsur kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas dari setiap program dan kegiatan operasional yang dilaksanakan (Wibisono, et al., 2024; Pramono, 2014). Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan daerah (Siswanto & Maylani, 2022). Sedangkan menurut (Nurfadila, 2022) evaluasi kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk yang dilakukan pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajiban kepada para pengguna dana dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

## KAJIAN PUSTAKA

Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis kinerja keuangan. Menurut (Restiana et al., 2024) analisis kinerja keuangan

merupakan bagian penting dalam analisis laporan keuangan dan analisis harus dilakukan secara cermat untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui berbagai rasio keuangan yang memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana dengan baik.

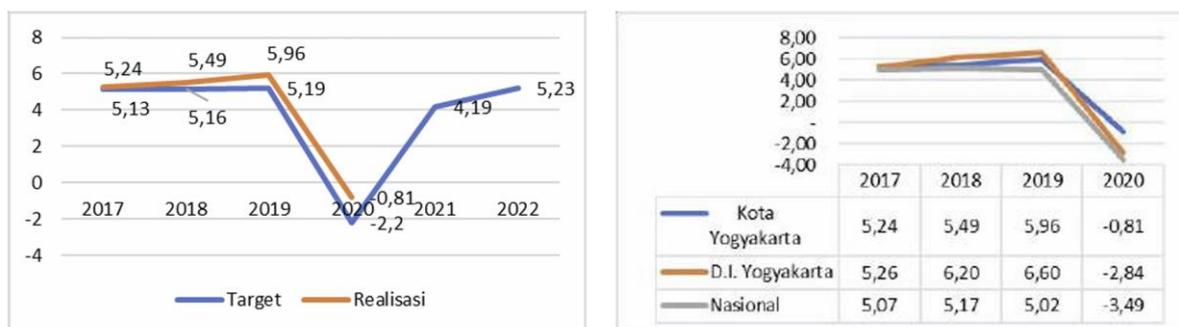
Sedangkan menurut (Nansi & Airawaty, 2021) untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih mendalam, perlu adanya perbandingan hasil perhitungan rasio keuangan pada beberapa tahun terakhir. Rasio keuangan dapat ditentukan dengan membandingkan antara suatu entitas dalam laporan keuangan dengan entitas lainnya (Awani & Hariani, 2021; Nansi, et al, 2023).

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Terlebih, kondisi ekonomi yang fluktuatif akibat pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi pengelolaan keuangan daerah selama periode 2020-2023. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode tersebut guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan keuangan dan efektivitas penggunaannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fahrevi et al., 2024), mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2022. Studi tersebut menemukan bahwa tingkat kemandirian meningkat dari 55,45% pada tahun 2021 menjadi 62,23% pada tahun 2022. Selain itu, tingkat efektivitasnya yang berfluktuasi namun tetap di atas 100% menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) terkelola dengan baik. Rasio efisiensi meningkat dari 4,11% pada tahun 2021 menjadi 5,01% pada tahun 2022, mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mencakup periode yang lebih panjang yaitu dari tahun 2020-2023 dan menambahkan analisis rasio keserasian. Kajian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjaga stabilitas fiskal di masa pandemi dan pemulihan ekonomi.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemulihan pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang fluktuatif mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta pada periode 2020-2023.

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022



Sumber: Analisis Bappeda Kota Yogyakarta 2020

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 turun secara drastis atau mengalami kontraksi sebesar -0,81% dibanding tahun 2019 sebesar 5,96%. Sedangkan jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta relatif lebih baik meskipun sama-sama mengalami kontraksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2020-2023. Analisis ini akan menilai beberapa aspek penting, seperti kemandirian, efektivitas, efisiensi dan keserasian dan rasio pertumbuhan sehingga dapat memberikan evaluasi

menyeluruh mengenai kinerja keuangan pemerintah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran di masa mendatang. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam empat tahun terakhir dan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah dalam memperbaiki manajemen keuangan ke depannya.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, hipotesis utama penelitian dalam jurnal adalah pandemi COVID-19 secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2020-2023, yang terlihat dari perubahan rasio keuangan dalam hal kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian anggaran, pertumbuhan, dan likuiditas. Dampak pandemi mengakibatkan penurunan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada tahun 2020, serta pergeseran prioritas belanja dari belanja modal ke belanja operasional. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya perbaikan pada rasio pertumbuhan keuangan, efisiensi anggaran, dan peningkatan likuiditas, meskipun rasio kemandirian fiskal dan efektivitas pengumpulan pajak daerah masih menghadapi tantangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif (*Descriptive Kuantitative Analysis Method*). Deskriptif kuantitatif adalah sebuah pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah atau mengikuti langkah-langkah penelitian dengan metode kuantitatif (Harahap, 2020).

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2023 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Keuangan, serta Laporan Rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 2020 hingga 2023. Data-data ini diakses melalui situs web resmi Pemerintah Kota Yogyakarta (<https://jogjakota.go.id>). Data yang digunakan meliputi informasi mengenai pendapatan daerah, anggaran belanja, serta rincian komponen keuangan lainnya yang dibutuhkan untuk menghitung lima rasio keuangan utama. Setiap tahun dalam periode tersebut menyajikan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan secara lengkap dan berkesinambungan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memverifikasi laporan keuangan untuk setiap tahun dalam periode penelitian, melakukan pencatatan pada indikator-indikator utama, dan menyusunnya dalam format yang dapat dianalisis secara statistik.

Penelitian ini menggunakan data periode 2020-2023 didasarkan pada beberapa alasan. Pada tahun 2020, menandai masa pandemic COVID-19, yang memberikan dampak signifikan terhadap situasi ekonomi dan keuangan daerah. Sehingga penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana pemerintahan Kota Yogyakarta dapat beradaptasi dan menghadapi tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh masa pandemi. Periode hingga tahun 2023 mencakup masa pemulihan setelah pandemi, memungkinkan penilaian mengenai stabilitas ekonomi serta efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan kota dalam masa pemulihan. Sehingga, analisis periode ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang tren kinerja keuangan, tantangan ekonomi dan proses pemulihan.

Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu: (1) Rasio Kemandirian, (2) Rasio Efektivitas, (3) Rasio Efisiensi, (4) Rasio Keserasian yang dilihat dari keserasian belanja operasi dan keserasian belanja modal, (5) Rasio Pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan PAD, pendapatan, belanja operasi, dan belanja Modal. Berikut penjabaran dari kelima rasio tersebut:

### (1) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah daerah bergantung pada dana eksternal, seperti yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi

(Salsabilla & Alam, 2023). Rasio ini dihitung dengan cara membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Transfer, lalu mengalikan hasilnya dengan 100 persen. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan dari masing masing tahun, maka pemerintahan dinilai semakin mandiri untuk mengelola dan memenuhi kebutuhannya. Rasio kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

(2) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah indikator yang mengukur sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, rasio ini membantu menilai sejauh mana daerah berhasil dalam merealisasikan target pendapatannya (Salsabilla & Alam, 2023). Rasio efektivitas dihitung dengan membagi relisasi PAD yang diterima dibagi anggaran PAD yang dianggarkan, kemudian dikali dengan seratus persen. Rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

(3) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan total pendapatan yang diterima. Dalam hal ini, rasio efisiensi mengukur sejauh mana suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien (Salsabilla & Alam, 2023). Rasio efisiensi dihitung dengan membagi total dari biaya belanja daerah dengan realisasi pendapatan keseluruhan dikali dengan seratus persen. Rasio Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Biaya Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

(4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian terbagi menjadi dua jenis, yaitu rasio keserasian biaya operasional dan rasio keserasian biaya modal. Rasio keserasian biaya operasional mengukur perbandingan antara total pengeluaran operasional pemerintah daerah dengan total pengeluaran daerah pada tahun fiskal yang sama. Rasio ini menggambarkan persentase dari belanja daerah yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah (Riswati & Bukhori, 2023). Rasio Keserasian biaya operasioanl dihitung dengan membagi biaya belanja operasi dengan total APBN, kemudian dikalikan dengan seratus persen. Rasio keserasiannya biaya operasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian Biaya Operasi} = \frac{\text{Biaya Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \dots\dots (4)$$

Sedangkan, rasio keserasian biaya modal adalah total realisasi belanja modal dibagi dengan total belanja pemerintah daerah pada tahun anggaran yang sama, rasio ini menggambarkan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan pada pembiayaan investasi berupa belanja modal yang bertujuan untuk memperkaya aset/barang milik daerah dalam satu tahun anggaran (Riswati & Bukhori, 2023). Rasio keserasian biaya modal dihitung dengan

membagi biaya belanja modal dengan total APBD, kemudian dikalikan dengan seratus persen. Rasio keserasian biaya modal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian Biaya Modal} = \frac{\text{Biaya Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

(5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya dari satu periode ke periode selanjutnya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai perkembangan pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tahun ke tahun (Salsabilla & Alam, 2023). Rasio pertumbuhan terdiri dari berbagai jenis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 4 rasio pertumbuhan, yaitu pertumbuhan PAD, Pendapatan, Biaya Operasi, dan Biaya Modal.

Secara singkat, rumus dalam menghitung rasio pertumbuhan mayoritas sama, hanya disesuaikan dengan indikator apa yang akan dianalisis. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan membagi indikator yang dihitung pada tahun ini dikurangi tahun sebelumnya dengan tahun sebelumnya, kemudian dikali dengan seratus persen. Beberapa jenis rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

$$\text{Rasio Perumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan } t1 - \text{pendapatan } t0}{\text{Pendapatan } t0} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

$$\text{Rasio Perumbuhan Biaya Operasi} = \frac{\text{Biaya Operasi } t1 - \text{Biaya Operasi } t0}{\text{Biaya Operasi } t0} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

$$\text{Rasio Perumbuhan Biaya Modal} = \frac{\text{Biaya Modal } t1 - \text{Biaya Modal } t0}{\text{Biaya Modal } t0} \times 100\% \dots\dots\dots(9)$$

Selain perhitungan rasio, penelitian ini juga menggunakan analisis tren untuk mengidentifikasi pola perubahan kinerja keuangan selama periode 2020-2023. Analisis tren dilakukan dengan membandingkan perkembangan setiap rasio dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilihat fluktuasi dan perubahan signifikan yang terjadi akibat pandemi serta masa pemulihan. Kemudian, penelitian ini juga Menerapkan analisis komparatif untuk membandingkan kinerja keuangan pada akhir masa pandemi dan pemulihannya. Perbandingan ini dilakukan untuk menilai bagaimana pandemi memengaruhi keuangan daerah. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk table untuk memudahkan pemahaman mengenai kondisi keuangan selama periode tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja

keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta memberikan masukan bagi perbaikan pengelolaan anggaran di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang wajib memberikan pertanggungjawaban atas anggaran dan realisasi dana yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam penelitian ini, analisis keuangan digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan langkah pemerintahan satu tahun kedepan. Penelitian ini menghasilkan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja kota Yogyakarta tahun 2020-2023, yang diharapkan dapat dipergunakan untuk menjadi dasar proyeksi keuangan tahun-tahun yang akan datang.

Standar Rasio Keuangan Pemerintah digunakan untuk mengevaluasi perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kota adalah dengan memanfaatkan rasio standar yang relevan sebagai acuan perbandingan. Tanpa adanya standar yang digunakan sebagai pedoman untuk menafsirkan rasio-rasio Pemerintah, analisis tidak dapat memberikan kesimpulan apakah kondisi rasio-rasio tersebut mengindikasikan kinerja yang baik atau buruk.

Rasio	Standar (%)	Kriteria
Rasio Kemandirian	0 - 25	Rendah Sekali
	25 - 50	Rendah
	50 - 75	Sedang
	75 - 100	Tinggi
Rasio Efektivitas	<100	Sangat efektif
	90 - 100	Efektif
	80 - 90	Cukup Efektif
	60 - 80	Kurang Efektif
	>60	Tidak Efektif
Rasio Efisien	<100	Tidak Efisien
	90 - 100	Kurang Efisien
	80 - 90	Cukup Efisien
	60 - 80	Efisien
	<60	Sangat Efisien
Rasio Pertumbuhan	0 - 10	Sangat Rendah
	11 - 20	Rendah
	21 - 30	Sedang
	>40	Tinggi

Tabel 1. Standar rasio keuangan (Salsabilla & Alam, 2023)

### Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (dalam Rp)	Pendapatan Transfer (dalam Rp)	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2020	563.174.371.396,88	1.105.993.726.262,42	51%	Partisipatif
2021	598.121.885.337,87	1.078.659.260.087,59	55%	Partisipatif
2022	725.577.542.997,58	1.164.344.581.722,00	62%	Partisipatif
2023	805.346.115.792,53	1.195.471.353.691,00	67%	Partisipatif

Tabel 2. Data sekunder Rasio Kemandirian (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1. di atas, pemerintah Kota Yogyakarta semakin meningkat dengan pola hubungan berlangsung secara partisipatif. Nilai tertingginya berada pada 67% pada tahun 2023 dan nilai terendah berada pada 51% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kota semakin mampu memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang sedang terhadap pendapatan transfer. Pemerintah perlu terus mengupayakan peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada dana eksternal.

### Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Anggaran PAD (dalam Rp)	Realisasi PAD (dalam Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2020	4769.18.678.411,89	563.174.371.396,88	118%	Efektif
2021	515.007.357.172,00	598.121.885.337,87	116%	Efektif
2022	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58	114%	Efektif
2023	695.268.581.456,00	805.346.115.792,53	116%	Efektif

Tabel 3. Data sekunder Rasio Efektivitas (data diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas kota Yogyakarta di tahun 2020-2023 dinilai efektif karena persentase yang didapatkan lebih dari 100% dengan nilai tertinggi 118% pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, namun keberlanjutan dari capaian ini memerlukan strategi yang konsisten.

### 3.3 Hasil Perhitungan Rasio Efisien

Tahun	Biaya Belanja Daerah (dalam Rp)	Realisasi Pendapatan (dalam Rp)	Rasio Efisiensi
2020	1.517.599.468.488,39	1.699.751.020.194,30	89%
2021	1.691.968.885.088,93	1.707.273.287.342,46	99%
2022	1.826.804.253.746,60	1.889.922.124.719,58	97%
2023	1.972.232.487.691,95	2.000.846.169.483,53	99%

Tabel 4. Data Sekunder Rasio Efisien (data diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio efisien kota Yogyakarta di tahun 2020-2023 cukup fluktuatif antara 89% (2020) hingga 99% (2021 dan 2023), yang menunjukkan pengelolaan sumber daya yang kurang efisien sepenuhnya. Pemerintah perlu memastikan efisiensi tetap terjaga, terutama dalam mengelola pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan yang optimal.

### 3.4 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian

Tahun	Biaya Operasi (dalam Rp)	Total APBD (dalam Rp)	Rasio Keserasian Belanja Operasi
2020	1.248.329.702.538,88	1.699.751.020.194,30	73%

2021	1.445.551.076.433,00	1.707.273.287.342,46	85%
2022	1.560.028.542.836,60	1.889.922.124.719,58	83%
2023	1.716.767.689.465,00	2.000.846.169.483,53	86%

Tabel 5. Data Sekunder Rasio Kecerasingan Belanja Operasi

Rasio kesesuaian belanja operasi menunjukkan peningkatan setiap tahun, dari 73% pada 2020 menjadi 86% pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa porsi belanja operasi kota Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang berarti anggaran daerah semakin banyak dialokasikan untuk pengeluaran operasional.

Tahun	Biaya Modal (dalam Rp)	Total APBD (dalam Rp)	Rasio Kecerasingan Belanja Modal
2020	193.523.645.423,93	1.699.751.020.194,30	11%
2021	240.007.571.435,93	1.707.273.287.342,46	14%
2022	263.386.424.104,00	1.889.922.124.719,58	14%
2023	251.570.529.366,83	2.000.846.169.483,53	13%

Tabel 6. Data Sekunder Rasio Kecerasingan Belanja Modal

Rasio kesesuaian belanja modal relatif stabil namun cenderung rendah, sekitar 11% hingga 14%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal, yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau investasi jangka panjang, tetap rendah dan tidak berubah signifikan sepanjang tahun.

### 3.5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	PAD t1 (dalam Rp)	PAD t0 (dalam Rp)	Rasio Pertumbuhan
2020	563.174.371.396,88	689.049.725.509,27	-18%
2021	598.121.885.337,87	563.174.371.396,88	6%
2022	725.577.542.997,58	598.121.885.337,87	21%
2023	805.346.115.792,53	725.577.542.997,58	11%

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan PAD

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan tajam pada rasio pendapatan asli daerah pada tahun 2020 mencapai -18% namun pertumbuhan PAD berhasil pulih dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan rasio pertumbuhan sebesar 21% dan kembali melambat pada 2023 di angka 11%. Hal ini menunjukkan bahwa kota Yogyakarta semakin mampu untuk meningkatkan pendapatan tanpa bergantung pada sumber eksternal lainnya.

Setelah penurunan di tahun 2020, pendapatan daerah secara keseluruhan menunjukkan pemulihan yang lambat namun stabil. Nilai terendahnya adalah -4% di tahun 2020 dan tertingginya adalah 11% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kota Yogyakarta semakin cepat dalam memperoleh pendapatan, sehingga mencerminkan kesehatan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang baik bagi kota Yogyakarta.

Tahun	Biaya Operasi t1 (dalam Rp)	Biaya Operasi t0 (dalam Rp)	Rasio Pertumbuhan
2020	1.248.329.702.538,88	1.404.860.023.602,17	-11%
2021	1.445.551.076.433,00	1.248.329.702.538,88	16%

2022	1.560.028.542.836,60	1.445.551.076.433,00	8%
2023	1.716.767.689.465,00	1.560.028.542.836,60	10%

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Biaya Operasi

Rasio pertumbuhan biaya operasi menunjukkan nilai yang stabil setelah melewati nilai terendahnya -11% pada tahun 2020. Rasio pertumbuhan kembali pulih dan mencapai nilai tertingginya pada tahun 2021 sebesar 16% dan mengalami perubahan stabil di tahun tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kota Yogyakarta semakin cepat dalam mengeluarkan biaya, sehingga operasi bisnis dan organisasi di kota Yogyakarta meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun	Biaya Modal t1 (dalam Rp)	Biaya Modal t0 (dalam Rp)	Rasio Pertumbuhan
2020	193.523.645.423,93	327.434.372.199,17	-41%
2021	240.007.571.435,93	193.523.645.423,93	24%
2022	263.386.424.104,00	240.007.571.435,93	10%
2023	251.570.529.366,83	263.386.424.104,00	-4%

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Biaya Modal

Rasio pertumbuhan biaya modal mengalami penurunan yang tajam dan mencapai nilai terendahnya angka -41% pada tahun 2020. Rasio ini kembali pulih dan meningkat tajam yang mencapai angka 24% pada tahun 2021. Namun, di dua tahun berikutnya, rasio ini mengalami penurunan kembali hingga -4% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kota Yogyakarta semakin mampu dalam mengelola pembiayaan secara lebih efisien atau pasar keuangan kota Yogyakarta lebih mendukung dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

Sebagai kota yang bertumpu pada sektor jasa pariwisata, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya melakukan perbaikan guna menarik wisatawan agar datang ke Yogyakarta. Efek dari pandemi yang masih menjadi fokus utama pemerintah kota Yogyakarta antara lain; 1). Menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta dan berakibat menurunnya tingkat hunian akomodasi dan hotel dan usaha makan minum dan minum. Efek domino yang lain adalah pekerja yang mendukung sektor pariwisata kehilangan pendapatan mereka. 2). Adanya kebijakan *refocusing* anggaran yang ditujukan untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran protokol kesehatan lebih diprioritaskan. Kegiatan promosi maupun yang mendorong kerumunan massa dihindari dan lebih diutamakan kegiatan promosi yang bersifat virtual. 3). Kurang optimalnya pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan masyarakat, pedagang dan *stakeholder* lain akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan harus dirasionalisasi atau dialihkan untuk penanganan protokol kesehatan. 4). Tingkat literasi digital pedagang dalam rangka mengakses pemasaran daring masih perlu ditingkatkan. 5). Kesadaran pedagang dan pengunjung untuk menjaga kondisi pasar yang bersih dan tertib dalam menempatkan barang dagangannya masih harus ditingkatkan.

Selain pariwisata, sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan dan industri manufaktur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis rasio keuangan Kota Yogyakarta periode 2020-2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan kota ini menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun masih ada tantangan. Rasio kemandirian meningkat, meski ketergantungan pada transfer pusat tetap ada. Rasio efektivitas menunjukkan pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan pendapatan, sementara rasio efisiensi mengalami fluktuasi yang mengindikasikan kebutuhan untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Belanja operasi meningkat, tetapi belanja modal relatif rendah, mencerminkan keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur jangka panjang. Pemulihan PAD

dan pendapatan daerah menunjukkan stabilitas ekonomi, meskipun biaya modal masih fluktuatif. Secara keseluruhan, Kota Yogyakarta memiliki pengelolaan keuangan yang baik dengan fokus pada pelayanan publik, meski ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam alokasi belanja modal. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja keuangan Kota Yogyakarta adalah: 1) Meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan permintaan pariwisata. 2) Mendorong penyelenggaraan event-event wisata yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif sebagai inovasi untuk mempromosikan pariwisata. 3) Mengoptimalkan penggunaan marketplace dan media sosial untuk mempromosikan produk-produk UKM di Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angin, P., Natalian, E., & Bharata, R. (2023). Analisis rasio keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1 (3)(3), 173–183. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/makreju/article/view/1657/1336>.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). <https://www.bps.go.id/id/infographic>
- Bappeda Kota Yogyakarta. (2020). <https://bappeda.jogjakota.go.id>
- Indrijawati, A. (2024). Literature Review : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Corresponding Author : Aini Indrijawati 1 Corresponding Author : Aini Indrijawati 2. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 9, 1–6. <https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep>.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 14(1), 11-20.
- Nansi, M. R., Arbintarso, E. S., & Rahayu, S. S. (2023). ANALISIS DAMPAK PEMASARAN ONLINE TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 184-197. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.636>
- Nansi, M. R. (2022). Financial Performance Analysis of PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta during Pandemic. *Journal of Management*, 12(4), 2705–2711. [www.enrichment.iocspublisher.org](http://www.enrichment.iocspublisher.org).
- Nansi, M. R., & Airawaty, D. (2021). Comparative Analysis Of The Financial Performance Of PT Bank BPD DIY And PT Bank BPD Central Java 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 7(2), 162–171
- Nurfadila, N. and. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Periode 2017 -2021. *SENAKOTA –Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*. <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/3658/1779>.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Putra, S. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 -2020. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.388>.
- Restiana, Isma, A., & Prasaja, A. S. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022. *EBISMAN* :

- EBisnis Manajemen*, 2(1), 08–24. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/EBISMAN/article/view/329>.
- Riswati, & Bukhori, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal Dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 41–55. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>.
- Salsabilla, R. V., & Alam, I. A. (2023). Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Jurnal EMT KITA*, 7(4), 1149–1156. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1605>.
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 20–29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>.
- Wibisono, M., Zahra, L., & Rinaldo, R. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Pulau Jawa Dengan Opini Audit. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(01), 123–131. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1138>.